

# Bab 1

# Pendahuluan

*Refleksi Pengembangan Jiwa Kewirausahaan, untuk  
Merubah Kecenderungan menjadi Peluang*

## **TUJUAN PEMBELAJARAN**

Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menjelaskan; Latar belakang, akar historis perguruan tinggi (PT) dan dunia wirausaha, polarisasi PT, meretas jiwa wirausaha, dan merefleksikan pengembangan manajemen kewirausahaan.

## **POKOK BAHASAN**

- Latarbelakang
- Refleksi Pengembangan Kewirausahaan
- Penerapan Mata Kuliah Manajemen Kewirausahaan
- Kebijakan Pendidikan Tinggi dalam menghadapi era Persaingan

## **TOPIK BAHASAN**

### **A. Latar Belakang Pentingnya Kewirausahaan di PT**

Perguruan Tinggi (PT) sebagai pusat pengembangan sains, teknologi, dan kebudayaan, memiliki kedudukan yang prestisius dalam kehidupan masyarakat. Hal itu tentu tidak terlepas dari eksistensi PT yang merupakan subsistem kehidupan global dan sains universal yang berorientasi pada nilai-nilai intelektual dari kebudayaan mondial. Namun demikian, khususnya PT di Indonesia merupakan subsistem pendidikan nasional yang berorientasi kepada pembangunan nasional. Seiring dengan perkembangan zaman, PT sebagai subsistem pendidikan nasional memiliki berbagai karakter yang berkaitan dengan latar belakang budaya bangsa dan akselerasi pembangunan nasional.

Sejalan dengan realitas tersebut, sejak dulu hingga kini perguruan tinggi menjadi tumpuan harapan bagi kawula muda terpelajar, orang tua, dan masyarakat untuk meraih masa depan gemilang. Hal itu dapat dipahami mengingat fungsi PT yang strategis dalam mempersiapkan generasi muda yang akan menguasai masa depan bangsa. Untuk itulah maka PT melakukan berbagai upaya inkulturasi berupa ilmu, ketrampilan, dan tata nilai universal agar generasi muda dapat melakukan aktualisasi diri sebagai garda depan bangsa.

Salah satu persoalan yang muncul kemudian adalah ketika ekspansi PT berlebihan sedangkan perkembangan ekonomi negara berjalan lamban, terlebih pada tigabelas tahun terakhir ini dan dunia industri/usaha tidak sanggup menyerap lulusan PT dengan jumlah yang sebanding. Akibatnya, muncullah persoalan pengangguran atau setengah pengangguran di kalangan lulusan PT yang menjadi keprihatinan kita. Sebab, hal itu dapat menjadi ganjalan bagi stabilitas nasional kita, mengingat para lulusan PT tersebut memiliki potensi yang sangat berbeda dengan tenaga tidak terdidik. Di samping itu, berarti penyelenggaraan PT merupakan pemborosan investasi yang cukup mahal jika tidak ditemukan solusi yang integralistik.

Di pihak lain, menjadi seorang wirausahawan pada umumnya kurang menarik bagi lulusan PT terutama warga masyarakat pedesaan/suburban karena orang Indonesia pada

umumnya belum mengakuinya sebagai "pekerjaan" yang prestisius. Orang akan bimbang ketika menjawab, bahwa dirinya "hanya" bekerja di sektor wiraswasta. Untunglah kita banyak kawula muda (termasuk para anak pejabat) yang memilih profesi sebagai pengusaha sehingga diharapkan dapat meningkatkan prestise pekerjaan non-pegawai (PNS/Swasta) dan pekerjaan sektor informal pada umumnya.

Permasalahannya adalah bagaimana kontribusi PT dalam membuka peluang kerja? Bagaimana eksistensi PT dalam menumbuh kembangkan dunia wirausaha? Itulah beberapa masalah yang akan dikaji dalam pengantar buku ajar manajemen kewirausahaan ini.

### **1. Akar Historis Perguruan Tinggi dan Dunia Industri**

Dari kacamata sosiologis, persoalan-persoalan yang muncul berkaitan dengan keengganan para mahasiswa untuk menjadi pengusaha (business man) itu sebenarnya berawal dari ide dasar pendidikan yang mengandaikan seseorang untuk memperoleh status sosial dan penghasilan yang lebih besar di sektor ekonomi karena pendidikan tinggi yang diperolehnya. Hal itu tidak terlepas dari eksistensi PT yang merupakan kunci mobilitas vertikal dan jaminan status bagi kelompok-kelompok sosial di masyarakat. Itu sebabnya kemudian bermunculan perguruan tinggi negeri (PTN) dan perguruan tinggi swasta (PTS) di kota-kota besar dan daerah berdasarkan ciri-ciri kelompok masyarakat kita yang beragam. Jadi, masalahnya yang semula ideologis yakni demokratisasi ekonomi, berubah menjadi sosiologis yakni pemenuhan keinginan masyarakat. Pada tahapan berikutnya, PT diintervensi oleh kekuasaan yang bersifat ekonomis dan menimbulkan persoalan-persoalan yang lebih luas baik ekonomi, sosial, politis maupun budaya.

Sebenarnya secara historis, PT di Indonesia yang dikenal sekarang itu tidak memiliki akar kultural di Indonesia. PT, meminjam istilah Umar Kayam (1989) merupakan lembaga produk asing (Barat), dengan seperangkat informasi, sains, dan nilai asing pula. Pada mulanya PT berpusat di biara-biara dan inti ilmunya adalah agama dan filsafat dengan biarawan sebagai pengajar dan calon rohaniwan sebagai mahasiswanya. Lambat laun PT terbuka untuk umum dan beralih menjadi Studium generale yang berkembang mengikuti dua model. Pola pertama yang berkembang di Italia merupakan PT Studiosorum, yakni

intinya mahasiswa berkumpul dan mencari sesuatu yang diperlukan. Adapun pola kedua berkembang di Perancis dengan pola unit PT Magistrorum, yakni guru berkumpul memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk belajar. Pola kedua itulah yang kemudian menyebar ke seluruh dunia hingga saat itu.

Sejak awal berdirinya, PT sudah dihadapkan pada dua kutub yang saling bertentangan. Pertama, *Anglo System*, karena pengaruh kaum industriawan Inggris dan Amerika, dan telah merumuskan kurikulumnya hingga selaras dengan kebutuhan masyarakat yakni kebutuhan industri (baca: kita lapangan kerja). Kedua, *Continental System* yang lebih menekankan pada masalah-masalah penelitian dan pemahaman ilmu, tanpa mempedulikan perkembangan masyarakat industri (Zahir, 1978). Di Indonesia agaknya sistem pertama itulah yang banyak dianut, meskipun sistem kedua juga dipakai.

Lalu, seberapa jauh PT dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat sesuai dengan kondisi dan materi yang dimilikinya? Adalah realitas bahwa PT melihat dirinya perlu berinteraksi dengan lingkungannya merupakan filsafat yang relatif baru. Sebelumnya PT berpegang kepada filsafat ivory tower yang berkuat pada pemikiran-pemikiran abstrak sebagai bagian dari pendidikan tinggi. Dalam filsafatnya yang baru PT berupaya untuk menjadi motor pembangunan, *agent of change* dalam upaya meningkatkan harkat kemanusiaannya. Hal itu sesuai dengan perumusan tugas PT yang dikemukakan oleh *World Association of Universities*, bahwa tanggung jawab PT adalah "membentuk kemampuan untuk memecahkan masalah-masalah manusiawi dan menolong manusia untuk membentuk kehidupan dunia yang lebih baik".

Dengan lebih operasional, Daniel Bell menyebut fungsi PT antara lain: (1) pemeliharaan tradisi kebudayaan (Barat); (2) pencarian (penelitian) kebenaran melalui penemuan dan scholarship; (3) melatih sebanyak mungkin kaum profesional di bidang-bidang tertentu; dan (4) penerapan pengetahuan untuk kepentingan masyarakat. Demikianlah perubahan orientasi sekaligus fungsi PT sesungguhnya telah meninggalkan pola berpikir yang intelektualistis dominasi positivisme dari semangat aufklarung dan evolusi pendidikan kemudian berbelok menjadi *child oriented dan community oriented* (lihat Sumianto dkk., 1989).

Adapun PT di Indonesia yang dikenal sekarang merupakan transplanted institution, lembaga cangkokan kebudayaan Barat yang dibawa ke Indonesia oleh Belanda dengan maksud untuk mempersiapkan tenaga kerja bagi kepentingan kolonial. PT yang semula bersifat elitis saja, itu ciri elitis itu tidak dapat dipertahankan lagi. PT itu membuka diri seluas-luasnya bagi generasi muda untuk memperoleh pendidikan di dalamnya, karena ide demokratisasi pendidikan yang dianut. Secara eksplisit fungsi PT di Indonesia dirumuskan dalam Tri Dharma PT yakni pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat. Adapun orientasinya tertera dalam GBHN dan Undang-undang No. 20 Tahun 2002 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) yakni untuk mendukung pembangunan manusia Indonesia secara komprehensif.

## **2. Polarisasi Perguruan Tinggi dalam Ideologi Ekonomi**

Pada era global yang penuh dengan persaingan ketat, PT dituntut untuk memiliki kualitas yang unggul. Jika pada masa lalu masalah kualitas PT itu sebagai gejala di negara berkembang, maka para ahli menyadari bahwa di negara maju pun kemerosotan kualitas PT tidak dapat dihindari. Penyebabnya begitu kompleks, antara lain resesi ekonomi, relevansi kurikulum PT dengan realitas sosial, keterlibatan PT dengan realitas sosial ekonomi, dunia industri, dominasi birokrasi, gerakan mahasiswa yang tidak murni (dikotori oleh hal-hal di luar idealisme, ditumpangangi pihak lain), dan lain-lain.

Adapun masalah yang berkaitan dengan lapangan kerja adalah realitas sosial bahwa PT telah begitu dirasuki oleh pemikiran-pemikiran ekonomi, walaupun secara historis ia adalah lembaga pendidikan. Pikiran pokok dari "industri pendidikan" itu adalah bahwa PT merupakan dasar pertumbuhan ekonomi, karena lembaga itulah yang menghasilkan pengetahuan *Know-how* untuk kemajuan industri dan tenaga kerja yang siap pakai guna menjalankan roda ekonomi (Vaizey, 1974). Begitu besar pengaruh pandangan itu sehingga negara-negara berkembang begitu percaya kepada kemampuan pendidikan formal itu dengan asumsi "semakin banyak pendidikan, semakin cepat akselerasi pembangunan berlangsung".

Berdasarkan asumsi itu maka tidak mengherankan jika

banyak kajian tentang PT berkuat di sekitar dua proses ekonomi yang fundamental, yakni: (1) interaksi antara permintaan yang bermotivasi ekonomis dan penawaran yang berelasi politis dalam menentukan berapa banyak sekolah akan didirikan, dan (2) pentingnya perbedaan antara manfaat sosial dan pribadi serta biaya-biaya dari berbagai tingkat pendidikan (Todaro, 1987).

Dengan perspektif demikian dapat dilihat betapa tuntutan kualitas PT selalu dihubungkan dengan tuntutan pasaran kerja, yang merefleksikan betapa PT dikuasai oleh *mainstream* ekonomi untuk berperan sebagai “pabrik tenaga kerja” yang akan dilempar ke pasar kerja. Demikianlah bagaimana perspektif ekonomi mendominasi dunia PT, yang berasumsi bahwa pendidikan merupakan salah satu kunci dari pembangunan ekonomi. Namun, justru dari situlah muncul kritik dari para pakar terhadap pola pikir semacam itu. Kritik itu antara lain menyatakan bahwa pendidikan formal telah berubah dari esensi hakikatnya semula. PT telah berubah menjadi *The alienation machine* menghasilkan *lost people* yang tercerabut dari akar kulturalnya. Pendidikan hanya menghasilkan kaum elit yang *disoriented* yang menghasilkan kemiskinan di kalangan mayoritas (Harrison, 1979).

Dalam upaya mengantisipasi realitas itu, tidak mengherankan jika muncul pemikiran-pemikiran yang menentang industrialisasi yang kemudian berubah menjadi gerakan-gerakan ideologikal yang menentang pendidikan formal karena dianggapnya sebagai satu bagian dari sistem intelektual dan struktur masyarakat yang mengekang dan memperbudak manusia. Timbullah gagasan-gagasan Ivan Illich dengan *de schooling society* dan Paulo Freire (1987) dengan *paedagogy of the oppressed* yang sangat populer itu.

### **3. Meretas Jiwa Wirausaha melalui Pendidikan Tinggi**

Para pakar ekonomi dan intelektual pada umumnya mengakui bahwa PT sangat potensial dan memiliki kompetensi besar dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Peran PT dalam pembangunan tidak saja mendidik generasi muda terpelajar dalam menyiapkan dirinya menjadi manusia pembangunan dan mengkaji serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan seni (IPTEKS) yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. PT juga harus menjamin bahwa IPTEKS itu benar-benar sampai kepada masyarakat dan dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya.

IPTEKS hanya memiliki makna jika dapat diterima dan dimanfaatkan secara luas oleh masyarakat yang memerlukan untuk meningkatkan kesejahteraannya. Oleh karena itu, PT harus dapat meyakinkan dirinya sendiri, melalui berbagai kegiatan Tri Dharmanya, bahwa IPTEKS yang dikembangkannya memang relevan, dapat diterima, dan dimanfaatkan oleh masyarakat dalam pembangunan termasuk dunia industri.

#### **4. Eksistensi PT dalam Pemberdayaan Ekonomi**

Eksistensi PT dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pengembangan jiwa kewirausahaan mahasiswa dapat terjadi jika PT memiliki komitmen dan kemampuan serta diberi peluang untuk berpartisipasi dalam kegiatan perekonomian. Peluang itu tercermin dalam seberapa jauh Tridharma PT telah berperan dalam pemberdayaan ekonomi melalui IPTEKS yang dimiliki dan dikembangkannya. Peluang itu dapat dilaksanakan melalui kegiatan intra dan ekstrakurikuler.

Dalam konteks pemberdayaan ekonomi, PT diharapkan dapat memainkan peran sebagai produsen tenaga kerja berkualitas, mengingat lulusan PT (Sarjana) potensial untuk duduk pada hierarki kepemimpinan dan manajemen pada masing-masing sektor. Namun demikian, karena struktur perekonomian Indonesia yang khas, maka ada beberapa kecenderungan yang menarik dari pola kesempatan kerja yang diperolehnya. Beberapa kecenderungan itu adalah sebagai berikut:

- a. Berdasarkan data yang ada, pada umumnya kualitas tenaga kerja Indonesia rendah, baik ditinjau dari segi pendidikan maupun keahlian dan ketrampilannya. Dari data sensus penduduk diketahui bahwa mayoritas tenaga kerja di Indonesia berpendidikan menengah ke bawah.
- b. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa sangat terasa adanya kesenjangan antara dunia pendidikan dengan dunia kerja walaupun sekolah-sekolah kejuruan telah didirikan, termasuk akademi dan politeknik. Fakta itulah barangkali yang kemudian mendorong Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah melalui Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) menggalakkan pembukaan/pendirian SMK di seluruh

wilayah Indonesia dengan semboyannya yang populer: “SMK Bisa!”.

- c. Sementara itu usaha pemerintah memperluas kesempatan belajar dan kesempatan kerja yang serius, justru menimbulkan persoalan lain yakni “merangsang harapan” untuk bekerja di sektor modern dan formal yang berdaya serap kecil. Struktur perekonomian kita ternyata masih lebih banyak membutuhkan unskilled labor daripada skilled labor.
- d. Dewasa ini dibutuhkan sejumlah besar tenaga kerja terdidik khususnya jurusan eksakta dan terapan di satu pihak, namun di pihak lain banyak lulusan PT khususnya jurusan non-eksakta tidak menda patkan kesempatan kerja. Semua itu menggambarkan struktur pendidikan kita kurang berorientasi pada lapangan kerja. Itulah sebabnya beberapa jurusan jenuh terpaksa ditutup (*passing out*).
- e. Khususnya di Indonesia, dunia pendidikan dihadapkan pada persoalan dilematis antara mengedepankan kualitas atau kuantitas lulusan pendidikan. Di satu sisi dibutuhkan banyak tenaga terdidik untuk memenuhi tuntutan pembangunan, dan di sisi lain dibutuhkan tenaga-tenaga berkualitas guna mengantisipasi perkembangan era global yang sangat kompetitif.
- f. Fakta menunjukkan bahwa jiwa wiraswasta (*enterpreunership*) di kalangan lulusan PT kurang dimiliki karena pada umumnya mahasiswa mengharapkan berlangsungnya budaya tradisi yakni bekerja di sektor formal sebagai tenaga *white collar*, karyawan berdasi yang dipandang lebih bergengsi atau prestisius (lihat Sumianto dkk., 1989).

Sejalan dengan hal itu, pengetahuan dan minat kewirausahaan di kalangan mahasiswa masih terbatas. Hal itu terjadi karena minimnya pengetahuan tentang ‘kewirausahaan’ yang diberikan oleh PT di bangku kuliah di samping kurangnya kegiatan kewirausahaan di kampus PT kita selama itu (meskipun di beberapa kampus terdapat kegiatan ekstrakurikuler berupa Koperasi Mahasiswa “KOPMA”).

Barangkali kondisi demikian juga tidak terlepas dari kebijakan pemerintah Republik Indonesia terutama Kemendiknas yang selama ini kurang menggalakkan minat dan budaya wirausaha di kalangan mahasiswa. Barangkali baru pada satu/dua dekade terakhir pemerintah melalui Ditjen Pendidikan

Tinggi Kemendiknas menggalakkan budaya wirausaha melalui program-programnya antara lain Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) dengan memberikan subsidi dana berupa hibah dana untuk modal usaha guna melatih dan mengembangkan jiwa kewirausahaan kepada para mahasiswa. Bahkan, beberapa PT yang maju telah memasukkan Kewirausahaan dalam kurikulumnya yang dijabarkan dalam mata kuliah.

Terlepas dari persoalan di atas, jika dicermati lebih jauh, ada hambatan kultural yang cukup mendasar. Dapat dicermati, meskipun mahasiswa mengetahui bahwa mencari pekerjaan atau menjadi “pegawai negeri” atau “pegawai swasta” itu sulit, mayoritas dari mereka tetap mengharapkan dapat bekerja di sektor modern dan formal. Hal itu didasarkan pada alasan utama ‘status sosial’ atau prestise (dan jaminan hari tua) sementara alasan finansial dinomorduakan. Bahkan, untuk menembus kesulitan memperoleh pekerjaan formal itu mereka terkadang tak segan-segan menggunakan jalur “neraka” yakni kolusi, nepotisme, dan “jalan belakang” (sejak zaman Orde Baru hingga pasca reformasi masih juga berlangsung jika tidak semakin menjadi-jadi).

Parahnya, kondisi itu sudah membudaya (mendarah daging) di kalangan masyarakat kita. Terlebih praktik KKN itu sudah mengakar karena dicontohkan oleh pimpinan pemerintahan hingga level yang paling rendah dalam birokrasi pemerintahan. Bahkan, kita kondisi diperparah lagi oleh kalangan legislatif yang mengaku ‘wakil rakyat’ yang pada saat berkampanye menyuarakan anti-KKN, sok suci, dan memperjuangkan kepentingan rakyat atau pejuang sosial.

Di luar faktor di atas, faktor yang juga cukup dominan adalah adanya hambatan sosio-kultural bahwa sejak awal ketika mereka akan menempuh studi/kuliah di PT, kebanyakan mereka memiliki obsesi untuk menjadi “pegawai” terutama “pegawai negeri”. Hal itu wajar mengingat menjadi wiraswastawan/pengusaha itu dalam pandangan masyarakat Indonesia yang belum maju terlebih masyarakat Jawa tradisional yang masih memegang sisa-sisa feodalisme, belum dapat diakui/dianggap oleh masyarakat menjadi “orang” (baca: dadi wong; kaum priyayi; kelompok elit). Terlebih bagi masyarakat pedesaan (yang masih kental pandangan feodalnya), menjadi “pegawai” meskipun bergaji kecil merupakan suatu berkah dan

kehormatan luar biasa.

Berdasarkan realitas itu, maka sudah selayaknya jika dalam upaya mengantisipasi dinamika global yang kompetitif dan perubahan sosial ekonomi yang sedang berlangsung di Indonesia, PT perlu menggalakkan kegiatan-kegiatan yang berdimensi kewirausahaan baik kegiatan intrakurikuler (akademik/perkuliahan) maupun kegiatan ekstrakurikuler (kemahasiswaan).

Kegiatan kewirausahaan itu dapat menjadi wahana bagi para mahasiswa untuk berlatih berwirausaha dan mengembangkan jiwa wirausaha. Pada gilirannya, setelah menyelesaikan studinya, mereka dapat ‘menciptakan lapangan pekerjaan’ dan menjadi wirausaha yang sukses, bukan sekadar ‘mencari pekerjaan’. Selain itu, mahasiswa dapat melatih dan memupuk jalinan koordinasi dengan instansi serta dan menciptakan jaringan bisnis dengan berbagai pihak sekaligus membangun jaringan kemitraan secara sinergis dalam dunia usaha yang menguntungkan.

Apabila hal-hal tersebut di atas dilaksanakan, maka PT akan dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang baru. Selain itu, PT beserta seluruh sivitas akademiknya akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat sekitarnya yang tumbuh secara dinamis dan secara bersama-sama mengangkat masyarakat ke taraf kehidupan yang lebih makmur dan sejahtera, upaya penanaman jiwa wirausaha dan pengembangan potensi kewirausahaan

## **B. Refleksi Pengembangan Kewirausahaan**

### **1. Merubah Kecenderungan menjadi Peluang**

Kemakmuran dari suatu negara bisa dinilai dari kemampuan negara tersebut untuk menghasilkan barang dan jasa yang berguna dan mendistribusikannya keseluruhan penduduk. Masalah yang timbul adalah faktor apa yang mendasari proses pembangunan kesejahteraan ekonomi? Beberapa negara, telah membangun perekonomian yang makmur, sementara negara lain yang walaupun mempunyai kondisi geografis dan sumber daya alam yang relatif lebih menguntungkan tidak bisa mencapai keberhasilan yang sama. Para ahli sejarah dan ahli ekonomi tidak selalu sependapat pada sumber yang mendorong tercapainya kemakmuran suatu negara, akan tetapi mereka sepakat tentang adanya kelompok individu yang menjadi pendorong

pertumbuhan ekonomi. Kelompok tersebut dinamakan wirausahawan.

Saat ini Indonesia dengan jumlah penduduk sebesar 220 juta jiwa membutuhkan sedikitnya 4,4 juta jiwa wirausaha, namun jumlah wirausaha yang ada mencapai 400 ribu jiwa atau kurang dari 1% populasi penduduk Indonesia, sementara menurut David McClelland bahwa sebuah negara baru bisa maju jika jumlah wirausaha terdapat sebesar 2% dari populasi penduduknya. Amerika Serikat misalnya, memiliki wirausaha 11,5% dari populasi penduduknya. Sedangkan negara tetangga Singapura terdapat sekitar 7,2% warganya bekerja sebagai wirausaha, sehingga negara kecil itu jauh lebih maju. Untuk menciptakan 4,4 juta jiwa wirausaha di Indonesia, paling tidak dibutuhkan waktu sedikitnya 25 tahun.

Jika melihat jumlah kebutuhan wirausaha baru untuk memposisikan Indonesia sebagai negara maju dan estimasi waktu yang cukup lama untuk mencapainya, maka saat ini perlu segera diupayakan langkah-langkah agar jumlah wirausaha baru dapat bertambah dengan waktu pencapaian yang relatif singkat. Salah satu langkah yang dapat dilakukan dengan penciptaan wirausaha baru yang berasal dari lulusan perguruan tinggi.

Hanya saja, data dan fakta telah membuktikan bahwa terdapat kecenderungan bahwa umumnya mahasiswa yang saat ini menempuh pendidikan di perguruan tinggi menginginkan pekerjaan yang mapan setelah mereka lulus menjadi sarjana. Fenomena membludaknya pendaftar ketika pemerintah membuka pendaftaran pegawai negeri sipil (PNS) dalam setiap tahun sebagai salah satu indikator. Meskipun setiap tahun pemerintah membuka pendaftaran, namun tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian besar dari mereka yang mendaftar mengalami kekecewaan karena tidak berhasil lulus. Peluang untuk menjadi PNS semakin kecil lagi setelah pemerintah memutuskan penundaan sementara (moratorium) tambahan formasi untuk penerimaan PNS sejak 1 September 2011 hingga 31 Desember 2012. Keterbatasan terserapnya lulusan perguruan tinggi di sektor pemerintah menyebabkan perhatian beralih pada peluang bekerja pada sektor swasta, namun beratnya persyaratan yang ditetapkan kadang membuat peluang untuk bekerja di sektor swasta juga semakin terbatas.

Wirausaha adalah seseorang yang bebas dan memiliki kemampuan untuk hidup mandiri dalam menjalankan kegiatan usahanya atau bisnisnya atau hidupnya. Ia bebas merancang, menentukan mengelola, mengendalikan semua usahanya. Sedangkan kewirausahaan adalah suatu sikap, jiwa dan kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru yang sangat bernilai dan berguna bagi dirinya dan orang lain. Kewirausahaan meruapakan sikap mental dan jiwa yang selalu aktif atau kreatif berdaya, bercrepta, berkarsa dan bersaahaja dalam berusaha dalam rangka meningkatkan pendapatan dalam kegaitan usahanya atau kiprahnya. Seorang yang memiliki jiwa dan sikap wirausaha selalu tidak puas dengan apa yang telah dicapainya. Dari waktu-ke waktu, hari demi hari, minggu demi minggu selalu mencari peluang untuk meningkatkan usaha dan kehidupannya. Ia selalu berkreasi dan berinovasi tanpa berhenti, karena dengan berkreasi dan berinovasi lah semua peluang dapat diperolehnya. Wirausaha adalah orang yang terampil memanfaatkan peluang dalam mengembangkan usahanya dengan tujuan untuk meningkatkan kehidupannya.

Pada hakekatnya semua orang adalah wirausaha dalam arti mampu berdiri sendiri dalam menjalankan usahanya dan pekerjaannya guna mencapai tujuan pribadinya, keluarganya, masyarakat, bangsa dan negaranya, akan tetapi banyak diantara kita yang tidak berkarya dan berkarsa untuk mencapai prestasi yang lebih baik untuk masa depannya, dan ia menjadi ketergantungan pada orang lain, kelompok lain dan bahkan bangsa dan Negara lainnya.

Satu-satunya peluang yang besar adalah bekerja dengan memulai usaha mandiri. Hanya saja, jarang kita temukan seseorang sarjana yang mau mengawali kehidupannya setelah lulus dari perguruan tinggi dengan memulai mendirikan usaha. Adanya kecenderungan yang demikian berakibat pada tingginya residu angkatan kerja berupa pengangguran terdidik. Jumlah lulusan perguruan tinggi dalam setiap tahun semakin meningkat tidak sebanding dengan peningkatan ketersediaan kesempatan kerja yang akan menampung mereka.

Pembelajaran kewirausahaan di perguruan tinggi merupakan salah satu solusi yang dapat diambil untuk menekan terjadinya peningkatan jumlah pengangguran yang berstatus

sarjana. Meskipun pembelajaran kewirausahaan di perguruan tinggi secara umum ditujukan agar mahasiswa mampu menjawab tantangan dan memanfaatkan peluang-peluang yang ada di sekitarnya dan tidak semata-mata ditujukan agar mahasiswa setelah lulus nantinya dapat membuka usaha baru, namun dengan bekal pembelajaran kewirausahaan setidaknya mereka telah memiliki bekal wawasan berwirausaha yang dapat dimanfaatkan ketika mereka tidak terserap pada lapangan kerja yang telah ada. Bahkan dengan mendirikan usaha baru, mereka justru dapat membantu dalam menekan meningkatnya angka pengangguran dengan merekrut angkatan kerja yang belum terserap pada lapangan kerja yang telah ada.

## **2. Upaya Penanaman Jiwa Wirausaha**

Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh PT bersama pemerintah dalam upaya penanaman jiwa wirausaha dan pengembangan potensi kewirausahaan itu, antara lain:

### **a. Mewujudkan peran PT dalam Pemberdayaan Ekonomi**

Guna mewujudkan peran PT dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui Tri Dharmanya itu, beberapa PT telah lama memprogramkan kegiatan kewirausahaan baik melalui program intrakurikuler (akademik) maupun kegiatan ekstrakurikuler antara lain terlihat pada Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) yang disponsori oleh Ditjen Dikti Kemendiknas.

#### **1) Kegiatan Intrakurikuler;**

Pengembangan kewirausahaan melalui kegiatan intrakurikuler, misalnya dimasukkannya materi Manajemen Kewirausahaan sebagai mata kuliah pilihan atau mata kuliah muatan lokal (mulok). Bahkan, Manajemen Kewirausahaan dijadikan mata kuliah wajib di beberapa PT tertentu, di samping mata kuliah Bahasa Inggris, dan Komputer atau Teknologi Informasi (Information Technology) guna menyongsong dunia global yang kompetitif. Untuk menunjang program kewirausahaan itu, di beberapa PT telah dibentuk Klinik Konsultasi Bisnis (KKB).

Berkaitan dengan matakuliah Manajemen Kewirausahaan yang diterapkan di PT., tidak terlepas kaitannya dengan implemtasi pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi KBK berdasarlan Kep. Mendiknas Nomor. 232/U/2000 tanggal 20 Desember 2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum

Pendidikan Tinggi dan Penilaian Belajar Mahasiswa menentukan antara lain: Kurikulum inti Program sarjana dan Program diploma, terdiri atas:

- a) Kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK)
- b) Kelompok Mata Kuliah Keilmuan dan Keterampilan (MKK)
- c) Kelompok Mata Kuliah Keahlian Berkarya (MKB)
- d) Kelompok Mata Kuliah Perilaku Berkarya (MPB)
- e) Kelompok Mata Kuliah Berkehidupan Bermasyarakat (MBB)

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi telah ditetapkan bahwa kelompok Matakuliah Berkehidupan Bermasyarakat (MBB) sebagai salah satu kelompok matakuliah dalam kurikulum inti yang minimal harus dicapai peserta didik dalam penyelesaian suatu program studi yang berlaku secara nasional;

Dalam konteks ini mata kuliah manajemen kewirausahaan adalah termasuk Kelompok Mata Kuliah Berkehidupan Bermasyarakat (MKB) dalam mengaplikasikan Ilmu dan teknologi (Aplikasi Science Teknologi).

Penerapan kelompok mata kuliah ini diatur tersendiri oleh keputusan Dirjen Pendidikan Tinggi, melalui SK Nomor 47/DIKTI/Kep/2006 tentang Rambu-Rambu Pelaksanaan Mata Kuliah Berkehidupan Bermasyarakat di Perguruan Tinggi, dengan landasan pada Visi dan misi; Visi kelompok MBB di perguruan tinggi merupakan sumber nilai dan pedoman bagi penyelenggara program studi guna mengantarkan mahasiswa memantapkan; kepribadian, kepekaan sosial, kemampuan hidup bermasyarakat, pengetahuan tentang pelestarian, pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup, dan mempunyai wawasan tentang perkembangan ilmu pengetahuan teknologi dan seni.

Sedangkan misi; kelompok MBB di perguruan tinggi membantu menumbuh-kembangkan: daya kritis, daya kreatif, apresiasi dan kepekaan mahasiswa terhadap nilai-nilai sosial dan budaya demi memantapkan kepribadiannya sebagai bekal hidup bermasyarakat selaku individu dan makhluk sosial yang:

- a) Berkeadaban, bermartabat serta peduli terhadap pelestarian

sumber daya alam dan lingkungan hidup;

- b) Memiliki kemampuan untuk menguasai dasar-dasar ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
- c) Dapat ikut berperan mencari solusi pemecahan masalah sosial budaya dan lingkungan hidup secara arif dalam konteks nasional dan global.

## **2) Kegiatan Ekstrakurikuler**

Adapun kegiatan kewirausahaan melalui kegiatan ekstrakurikuler, antara lain diaplikasikan dalam Koperasi Mahasiswa (KOPMA), pelatihan kewirausahaan mahasiswa secara terprogram, tersistem, dan berkesinambungan. Pelatihan tersebut ditindaklanjuti dengan studi lapangan ke perusahaan-perusahaan mitra dan praktik kerja lapangan.

### **b. Kebijakan Pemerintah tentang Kewirausahaan**

Untuk mendukung program pengembangan jiwa kewirausahaan itu, secara khusus pada Juli 1995 telah dicanangkan Program Pengembangan Jiwa Kewirausahaan oleh Presiden RI di dalam salah satu kerangka program pemerintah untuk mengembangkan SDM Indonesia. Bahkan, secara formal penggalakan jiwa kewirausahaan itu diwujudkan dalam sebuah Inpres No. 4 Tahun 1995 tentang Gerakan Nasional Memasyarakatkan dan Membudayakan Kewirausahaan (GN-MMK). Juga, adanya Memorandum Bersama Kantor Menteri Negara Kependudukan/BKKBN dan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 27/HK-104/E6/96, No. 0314/U/1996 tentang Peran Serta Mahasiswa Indonesia dalam Program Pembangunan Keluarga Sejahtera dalam rangka Penanggulangan Kemiskinan melalui Program Kegiatan Mahasiswa PT di Indonesia.

### **c. Program-program Kewirausahaan.**

Sebagai realisasi upaya pertama dan kedua, secara eksplisit upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat oleh PT dan pemberian peluang bagi mahasiswa dalam menanamkan jiwa dan memupuk bakat kewirausahaan itu dilaksanakan dalam bentuk Kuliah Kerja Usaha (KKU). Aplikasi KKU tersebut dilaksanakan bersama-sama melalui bentuk-bentuk Praktik Kerja Lapangan-Usaha (PKL-U), Kuliah Kerja Nyata-Usaha (KKN-U), Karya

Alternatif Mahasiswa-Usaha (KAM-U), Pengabdian kepada Masyarakat-Usaha (PkM-U), dan Program Vucer-Usaha (PV-U) serta Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) bidang Kewirausahaan dengan pemberian subsidi dana sebagai modal kerja.

#### **d. Menciptakan Jaringan dengan Kementerian atau Instansi lain.**

Guna mewujudkan program pengembangan kewirausahaan di kalangan mahasiswa, maka PT perlu menciptakan jaringan dengan bekerja sama dengan berbagai instansi, departemen, dan dunia industri. Hal itu penting agar para mahasiswa yang telah menerima mata kuliah Kewirausahaan (intrakurikuler) ataupun mengikuti pelatihan kewirausahaan dalam organisasi kemahasiswaan (ekstrakurikuler) dapat melakukan studi lapangan, praktik kerja lapangan, dan magang di dunia industri/usaha. Dengan demikian, mahasiswa benar-benar memiliki pengalaman konkret berwira usaha di samping wawasan kewirausahaan.

Salah satu tujuan khusus program KKU itu adalah melatih mahasiswa agar mampu mengelola program KWU yang berkesinambungan berdasarkan pemikiran komprehensif, analitis, dan proyektif melalui berbagai bentuk kegiatan mahasiswa yang mendukung usaha ekonomi produktif. Dengan KKU itu diharapkan mahasiswa memiliki jiwa, motivasi, dan kemampuan untuk terjun ke dunia usaha secara lebih profesional, prospektif, dan kompetitif, di samping dapat melakukan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang masih sangat memerlukan uluran tangan kalangan PT.

Berdasarkan analisis di atas dapat dikemukakan banyaknya lulusan perguruan tinggi yang enggan menjadi pengusaha (business man) tidak terlepas dari minimnya upaya PT dalam memberikan bekal kepada mereka baik melalui perkuliahan dan pelatihan maupun fasilitas yang diperlukan. Selain itu, faktor yang dominan yang membuat lulusan PT kurang tertarik menjadi pengusaha adalah adanya hambatan sosiokultural dan psikologis bahwa pengusaha dipandang bukan profesi bergengsi. Belum dikatakan menjadi kaum “priyayi” jika seseorang belum menjadi pegawai negeri atau pegawai perusahaan besar.

---

PT memiliki peran besar dalam melahirkan tenaga-tenaga

kerja terdidik dalam bidangnya ataupun lintas bidang dan tenaga yang memiliki wawasan dan jiwa kewirausahaan. Akan tetapi dalam realitanya, PT justru sering terjebak dalam memproduksi tenaga-tenaga penganggur terdidik karena adanya hambatan sosio-kultural yang hingga kini masih cukup dominan di kalangan masyarakat kita. Terlepas dari berbagai masalah dengan dunia industry, PT memiliki peran penting dalam pengembangan sumber daya insani. Adapun permasalahan mengenai PT kaitannya dengan pengembangan dunia usaha dan kewirausahaan yang hingga kini belum optimal, itulah tantangan yang harus dihadapi dan dipecahkan.

Akhirnya, perlu disampaikan bahwa uraian di atas baru merupakan kajian selintas, kajian itu masih memerlukan diskusi panjang dan pengkajian yang lebih mendalam. Termasuk untuk menjawab pertanyaan hipotetis: PT merupakan mesin produksi tenaga kerja terdidik profesional, atau sebaliknya mesin produksi penganggur terdidik? Salah satu hal yang paling penting dalam menjawab pertanyaan di atas, penerapan mata kuliah manajemen kewirausahaan menjadi bagian penting dalam implementasi kebijakan kurikulum KBK pada perguruan tinggi.

### **3. Pengembangan Potensi Kewirausahaan**

Gagasan penerapan mata kuliah manajemen kewirausahaan, diharapkan PT dapat mendukung pembangunan manusia Indonesia secara komprehensif. Pembangunan manusia secara komprehensif, sebagaimana tersirat dalam UU Sisdiknas No. 20 tahun 2003 bahwa “Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara”.

Bila dicermati definisi pendidikan menurut UU Sisdiknas No 20 tahun 2003 nampaknya cukup komprehensif dan perlu dijadikan dasar bagi kajian tentang pendidikan di Indonesia, di mana pendidikan mencakup unsur-unsur sebagai berikut:

1. Usaha sadar dan terencana
2. Perwujudan suasana belajar dan proses pembelajaran
3. Pengembangan potensi peserta didik

4. Mencapai kekuatan spiritual keagamaan
5. Pengendalian diri, kepribadian, akhlak mulia serta ketrampilan untuk kepentingan dirinya, masyarakat bangsa dan negara.

Pendidikan merupakan faktor penting dalam kehidupan manusia, karena pendidikan mempunyai peranan yang sangat esensial dalam membina martabat manusia, memelihara dan mengembangkan nilai kebudayaannya. Oleh karena itu, selama manusia hidup di dunia, pendidikan menjadi hal yang paling utama di antara kebutuhan hidup manusia lainnya. Hal tersebut terkait dengan dengan pendidikan yang berwawasan kewirausahaan, adalah pendidikan yang menerapkan prinsip-prinsip dan metodologi ke arah pembentukan kecakapan hidup (*life skill*) pada peserta didiknya melalui kurikulum yang terintegrasi yang dikembangkan di sekolah/ perguruan tinggi.

Konsep *life skills* merupakan wacana pengembangan kurikulum yang telah sejak lama menjadi perhatian para pakar kurikulum seperti Tyler, (1947) dan Hilda Taba, (1962), (dalam Satori, 2003:1).

*Life skills* adalah pengetahuan dan sikap yang diperlukan seseorang untuk bisa hidup bermasyarakat. *Life skills* memiliki makna yang lebih luas dari *employability skills* dan *vocational skills*. Keduanya merupakan bagian dari program *life skills*. Brollin (1989:46), menjelaskan bahwa "*life skills constitute a continuum of knowledge and aptitudes that are necessary for a person to function effectively and to avoid interruption of employment experience*". Dengan demikian *life skills* dapat dijelaskan sebagai kecakapan untuk hidup.

Pengertian hidup di sini, tidak semata-mata memiliki kemampuan tertentu saja (*vocational job*), namun ia harus memiliki kemampuan dasar pendukungnya secara fungsional seperti membaca, menulis, menghitung, merumuskan dan memecahkan masalah, mengelola sumber-sumber daya, bekerja dalam tim atau kelompok, terus belajar di tempat bekerja, mempergunakan teknologi, dan sebagainya. (Djatmiko: 2004:34).

Pengertian lain yang dipandang cukup mewakili menyatakan bahwa *Life skills are skills that enable a person to cope with the stresses and challenges of life* (Satori, 2003:2). *life skills* atau kecakapan hidup dalam

pengertian mengacu pada berbagai ragam kemampuan yang diperlukan seseorang untuk menempuh kehidupan dengan sukses, bahagia dan secara bermartabat di masyarakat.

*Life skills* merupakan kemampuan yang diperlukan sepanjang hayat, kepemilikan kemampuan berfikir yang kompleks, kemampuan komunikasi secara efektif, kemampuan membangun kerjasama, melaksanakan peran sebagai warga negara yang bertanggung jawab, memiliki kesiapan serta kecakapan untuk bekerja, dan memiliki karakter dan etika untuk terjun ke dunia kerja. Oleh karenanya, cakupan *life skills* amat luas seperti: *communication skills, decision making skills, resources and time management skills, and planning skills*. Pengembangan program *life skills* pada umumnya bersumber pada kajian bidang-bidang berikut: dunia kerja (*the world of work*), keterampilan hidup praktis (*practical living skills*), pengelolaan dan pertumbuhan SDM (*personal growth and management*), dan keterampilan sosial (*social skills*).

#### **4. Tahapan-Tahapan mata kuliah yang dapat di terapkan dalam pengembangan jiwa kewirausahaan mahasiswa**

Tahapan-Tahapan mata kuliah yang dapat di terapkan dalam pengembangan jiwa kewirausahaan mahasiswa, adalah:

##### **a. Mata Kuliah Ekonomi Teknik (untuk mahasiswa dari program studi engineering atau science)**

Pada mata kuliah ini mahasiswa akan diberitahukan pengetahuan tentang konsep dasar ekonomi, bunga, cash flow, investasi dan metode-metode penyusutan, dalam pelaksanaannya mahasiswa akan diberikan contoh tentang konsep bunga dan investasi serta bagaimana belajar menggunakan metode-metode pemilihan investasi (ex, IRR, NPP, BCR, dll)

##### **b. Matakuliah Kewirausahaan dan Perencanaan Bisnis**

Pada Mata kuliah ini mahasiswa akan diberikan pengetahuan yang riil bagaimana memunculkan ide sampai dengan pembuatan proposal perencanaan bisnis. Dalam pelaksanaannya mahasiswa akan di dampingi oleh dosen dan diberikan wawasan oleh praktisi.

##### **c. Mata Kuliah Pengembangan Usaha**

Pada mata kuliah ini akan dibentuk kelompok-kelompok

yang terdiri dari disiplin ilmu yang ada di PT, yang akan mengimplementasikan usaha berdasarkan perencanaan bisnis yang paling layak pada mata kuliah kewirausahaan dan Perencanaan Bisnis dengan pemodalannya sendiri atau pihak luar. Pada tahap ini mahasiswa akan di dampingi oleh dosen, inkubator bisnis dan praktisi.

### **C. Kebijakan Pendidikan Tinggi dalam menghadapi era Persaingan**

#### **1. Kebijakan Pendidikan**

Era baru dunia pendidikan, diperlukannya reformasi pendidikan yang berkaitan erat dengan sistem informasi yang dibutuhkan dalam pengembangan dunia pendidikan. Konsep ini memiliki nuansa bagaimana dunia pendidikan berusaha menggunakan perangkat komputer, yang dapat di aplikasikan sebagai sarana komunikasi untuk meningkatkan kinerja dunia pendidikan secara signifikan. Sistem informasi manajemen merupakan sistem operasional yang melaksanakan beraneka-ragam fungsi untuk menghasilkan luaran yang berguna bagi pelaksanaan operasi dan manajemen organisasi yang bersangkutan (Gordon, 1998:1).

Untuk menghadapi era persaingan, pendidikan tinggi di Indonesia “termasuk pendidikan tinggi keagamaan” harus mempersiapkan tiga aspek yang sangat strategis. Ketiganya yaitu perbaikan kurikulum dan program pendidikan, peningkatan kemampuan berbahasa Inggris sebagai bahasa kedua untuk komunikasi tingkat regional, dan menyiapkan para mahasiswa sebagai profesional muda yang memiliki budaya kerja baik (Dede Rosyada 2014.:11).

#### **2. Kebijakan Pengembangan Kurikulum Pendidikan Tinggi**

Tahun 2013 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah merubah kurikulum mulai dari pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi. Sesuai dengan Undang-Undang No 12 tahun 2012, bahwa perguruan tinggi memiliki otonomi dalam penyusunan kurikulum, namun pada pelaksanaannya diperlukan rambu-rambu yang sama agar dapat mencapai hasil yang optimal. Disamping itu, peserta didik di perguruan tinggi

merupakan insan dewasa, sehingga dianggap sudah memiliki kesadaran dalam mengembangkan potensi diri untuk menjadi intelektual, ilmuwan, praktisi, dan atau professional. Sehubungan dengan itu, maka perubahan pada proses pembelajaran menjadi penting dan akan menciptakan iklim akademik yang akan meningkatkan kompetensi mahasiswa baik *hardskills* maupun *softskills*. Hal ini sesuai dengan tujuan Pendidikan Tinggi dalam UU No 12 tahun 12 yaitu menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, seluruh mahasiswa harus mengikuti pembelajaran mata kuliah dasar umum yang dikenal dengan MKDU (general education). Sebagian dari MKDU telah dinyatakan dalam UU No 12 tahun 2012 sebagai mata kuliah wajib, yaitu Agama, Pancasila, Kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia. Dalam rangka menyempurnakan capaian pembelajaran, maka MKDU ditambah dengan bahasa Inggris, Kewirausahaan, dan mata kuliah yang mendorong pada pengembangan karakter lainnya, baik yang terintegrasi maupun individu.

Mata Kuliah Kewirausahaan merupakan pelajaran yang membentuk karakter wirausaha atau minimal mahasiswa menambah pengetahuan mahasiswa mengenai seluk-beluk bisnis baik dari *sisi soft skill* maupun *hard skill* sehingga mahasiswa mampu memanfaatkan peluang-peluang yang ada di sekitarnya dalam menciptakan usaha sendiri setelah lulus maupun saat masih kuliah. Pada tahun ini dihasilkan rencana pembelajaran secara rinci, beserta bahan ajar yang kami berharap dapat digunakan oleh kalangan dosen pengampu di perguruan tinggi. Penyusunan rencana pembelajaran dan bahan ajar ini didanai oleh Satker Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Ditjen Dikti tahun 2012. Bahan ini akan diunggah di web Dikti agar menjadi sumber belajar terbuka bagi semua.

### **3. Kebijakan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) untuk memperkuat kualifikasi lulusan Pendidikan tinggi**

Salah satu jalan perbaikan kurikulum dan program pembelajaran adalah *redesign* kurikulum dimana dengannya para

mahasiswa berkesempatan melatih diri dalam satu atau dua keterampilan/keahlian sehingga memiliki kompetensi yang sesuai dengan permintaan pasar kerja tanpa mengurangi kewajiban belajar pada kompetensi utama program studinya. Pelatihan keterampilan/keahlian merupakan perlakuan formal berbasis kurikulum dan dipertanggungjawabkan dalam transkrip nilai, sertifikat kompetensi dan juga SKPI. Akan tetapi, jika struktur kurikulumnya sudah padat, dan sudah memiliki satu *skill* khusus sesuai program studi, namun akan menambahkan kompetensi lain, fakultas boleh membuka kesempatan pada para mahasiswa untuk mengikuti program pelatihan ekstra yang diprogramkan fakultas sebagai program bersertifikat.

Untuk merespon kebijakan pemerintah tersebut, maka seluruh perguruan tinggi “termasuk pendidikan tinggi keagamaan Islam yang mengelola program studi keagamaan dan sebahagian besar tidak diorientasikan pada pasar kerja” harus memberikan perhatian serius dengan mengembangkan program-program pelatihan dan workshop bagi para mahasiswa, khususnya untuk keterampilan dan keahlian alternatif di luar keahlian program studi, bersertifikat dan dapat dideskripsikan dalam SKPI, sehingga bisa dijadikan informasi penting untuk memasuki pasar kerja. Rancangan baru pendidikan tinggi tersebut sebagai sebuah gerakan inovatif untuk mengakses seluruh sarjana Strata I atau diploma IV pada pasar kerja yang sangat luas, tidak hanya di Indonesia, melainkan juga di negara-negara ASEAN.

Dengan adanya AEC maka Pendidikan tinggi, perlu menyiapkan informasi lulusan yang bermutu dan berdaya guna. Salah satu informasi untuk memperkuat kualifikasi lulusan Pendidikan tinggi termasuk PTKIS, adalah dengan diterbitkan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI). SKPI merupakan dokumen tambahan yang menyatakan kemampuan kerja, penguasaan pengetahuan, dan sikap/moral seorang lulusan yang lebih mudah dimengerti oleh pihak pengguna di dalam maupun luar negeri

Kebijakan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI), merupakan amanat Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi. Permendikbud merupakan turunan Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. Dalam Pasal 44 ayat 1 sampai ayat 3, UU Nomor 12 mengharuskan setiap perguruan tinggi memberikan sertifikat kompetensi bagi setiap lulusannya sebagai keterangan resmi tentang kompetensi mereka sekaligus bisa digunakan untuk mendapat pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya (UUD.No12 Th.2012). Dengan demikian, UU Nomor 12 tahun 2012 secara tegas mengarahkan agar setiap lulusan perguruan tinggi bisa memasuki pasar kerja. Dan untuk itu, setiap lulusan pendidikan tinggi harus memiliki sertifikat kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.

Dengan demikian, SKPI merupakan sebuah dokumen resmi yang harus diperoleh setiap sarjana Strata 1 atau diploma IV yang mendampingi ijazah dan transkrip nilai mereka. SKPI dituliskan dalam dua bahasa, Indonesia dan Inggris, sehingga bisa difahami para pengguna di Indonesia dan negara lain. Penulisan dwi bahasa juga memungkinkan para sarjana sendiri bisa mengakses pasar kerja global, setidaknya di seluruh negara ASEAN. Selanjutnya, SKPI juga menjelaskan seluruh kompetensi bersertifikat yang dimiliki masing-masing sarjana, khususnya yang didapat dari kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh program studi sebagai program pendidikan keterampilan dan keahlian alternatif yang dapat melengkapi kompetensi kesarjanaannya mereka. Selain itu, SKPI juga menjelaskan keterampilan atau keahlian bersertifikat yang diperoleh melalui festival atau kompetisi selama mereka kuliah pada program studi yang melahirkannya. Harapannya, melalui SKPI, setiap sarjana dapat terakseskan pada pasar kerja di seluruh negara ASEAN dan siap berkompetisi dengan para sarjana dari universitas lain.

Terkait hal itu, Permendikbud Nomor 81 tahun 2014 juga menyebutkan bahwa SKPI harus ditulis dalam dua bahasa, Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Penggunaan dua bahasa didasarkan pertimbangan bahwa para sarjana yang akan memasuki pasar kerja saat ini memiliki kesempatan sangat luas dengan dibukanya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

#### **D. Relevansi Mata Kuliah Kewirausahaan Dengan Kurikulum PT dan Kebijakan SKPI**

##### **1. Kurikulum Kewirausahaan Di Perguruan Tinggi**

Globalisasi ekonomi dan era informasi mendorong industri

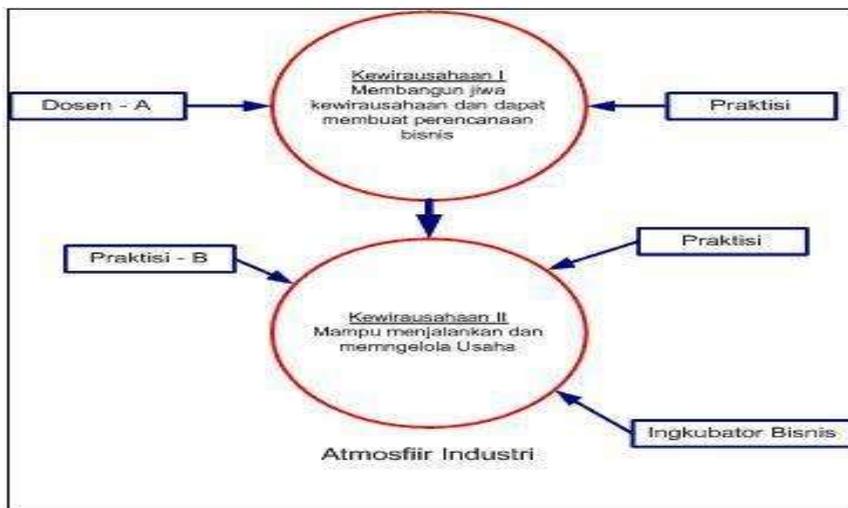
menggunakan sumber daya manusia lulusan perguruan tinggi yang handal dan memiliki jiwa kewirausahaan. Akan tetapi tidak setiap lulusan perguruan tinggi memiliki jiwa kewirausahaan seperti yang diinginkan oleh lapangan kerja tersebut. Kenyataan menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil lulusan perguruan tinggi yang memiliki jiwa kewirausahaan.

Ada suatu pendapat bahwa, saat ini sebagian besar lulusan perguruan tinggi di Indonesia masih lemah jiwa kewirausahaannya. Sedangkan sebagian kecil yang telah memiliki jiwa kewirausahaan, umumnya karena berasal dari keluarga pengusaha atau dagang. *Tracer study* atau penelusuran lulusan perguruan tinggi yang dilakukan terhadap lulusannya (*Tracer Study*, 2004), menunjukkan bahwa jiwa kewirausahaan menempati urutan paling bawah atau paling lemah. Hasil penelusuran lulusan ini menunjukkan bahwa salah satu misi institusi untuk menghasilkan lulusan yang memiliki jiwa kewirausahaan masih belum terpenuhi. Pada kenyataannya menunjukkan bahwa kewirausahaan adalah merupakan jiwa yang bisa dipelajari dan diajarkan. Seseorang yang memiliki jiwa kewirausahaan umumnya memiliki potensi menjadi pengusaha tetapi bukan jaminan menjadi pengusaha, dan pengusaha umumnya memiliki jiwa kewirausahaan.

Jiwa kewirausahaan seseorang tercermin pada berbagai hal misalnya kemampuan kepemimpinan, kemandirian (termasuk di dalamnya adalah kegigihan), kerja sama dalam tim, kreatifitas, dan inovasi. Salah satu kemungkinan penyebab lemahnya jiwa kewirausahaan lulusan perguruan tinggi ini ditengarai oleh proses pembelajaran di perguruan tinggi yang masih terbatas pada teori semata dan belum secara terkondisi membangun jiwa kewirausahaan tersebut dalam kegiatan nyata industri dan dunia kerja. Penyebab lainnya adalah perkuliahan masih bertumpu pada cara pembelajaran *Teacher Center* yaitu dosen sebagai pusat kegiatan pembelajaran. Cara pembelajaran ini terbukti menghasilkan lulusan yang tingkat kemandiriannya rendah.

Disisi lain, krisis ekonomi menyebabkan jumlah lapangan kerja tidak tumbuh, dan bahkan berkurang karena bangkrut. Dalam kondisi seperti ini, maka lulusan PT dituntut untuk tidak hanya mampu berperan sebagai pencari kerja tetapi juga harus mampu berperan sebagai pencipta kerja. Keduanya memerlukan jiwa kewirausahaan. Oleh karena itu, agar supaya PT mampu

memenuhi tuntutan tersebut, berbagai inovasi diperlukan diantaranya adalah inovasi pembelajaran dan perubahan silabus dan konten pada mata kuliah kewirausahaan.



**Gambar 1. 1**

### **Model Implementasi Kurikulum Kewirausahaan**

Gambar 1.1, menunjukkan model perubahan kurikulum kewirausahaan, diharapkan dengan model tersebut lulusan PT akan memiliki jiwa entrepreneurship yang baik.

## **2. Relevansi Mata Kuliah Kewirausahaan dengan Kebijakan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI)**

Diketahui, implementasi MEA memungkinkan meluasnya pasar kerja di seluruh negara ASEAN. Sesuai kesepakatan Bali Concord II tahun 2003 diputuskan bahwa mulai tahun 2015 berlaku *free flow of service* (aliran layanan gratis), di seluruh negara ASEAN bagi seluruh warga negara-negara di kawasan ini (Economic Community Blueprint, 2008:10). Dengan demikian, sarjana yang ada di posisi level enam KKNI, yang merupakan calon wirausahawan dan tenaga profesional, harus diakses pada lapangan kerja dengan dokumen resmi dari lembaga pendidikan yang melahirkannya, baik untuk pasar kerja di Indonesia maupun di negara-negara ASEAN lainnya.

Dengan demikian, nampak jelas bahwa mata kuliah manajemen kewirausahaan menduduki posisi penting dalam mengatarkan mahasiswa untuk memiliki jiwa kewirausahaan.

Kompetensi yang dicandangkan untuk mata kuliah ini, yaitu: Keberhasilan dalam perkuliahan manajemen kewirausahaan ini diindikasikan sebagai berikut: (1) mahasiswa memiliki jiwa dan semangat kewirausahaan, kreatif, inovatif, dan mandiri dalam hidupnya di tengah-tengah masyarakat, (2) memiliki konsep perencanaan usaha, produksi, dan pemasaran, (3) melakukan salah satu jenis usaha dibidang kewirausahaan.

### **3. Penerapan Mata Kuliah Kewirausahaan di PT**

Tahun 2013 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan merubah kurikulum mulai dari pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi. Sesuai dengan Undang-Undang No 12 tahun 2012, bahwa perguruan tinggi memiliki otonomi dalam penyusunan kurikulum, namun pada pelaksanaannya diperlukan rambu-rambu yang sama agar dapat mencapai hasil yang optimal. Disamping itu, peserta didik di perguruan tinggi merupakan insan dewasa , sehingga dianggap sudah memiliki kesadaran dalam mengembangkan potensi diri untuk menjadi intelektual, ilmuwan, praktisi, dan atau professional. Sehubungan dengan itu, maka perubahan pada proses pembelajaran menjadi penting dan akan menciptakan iklim akademik yang akan meningkatkan kompetensi mahasiswa baik *hardskills* maupun *softskills*. Hal ini sesuai dengan tujuan Pendidikan Tinggi dalam UU No 12 tahun 12 yaitu menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, seluruh mahasiswa harus mengikuti pembelajaran mata kuliah dasar umum yang dikenal dengan MKDU (*general education*). Sebagian dari MKDU telah dinyatakan dalam UU No 12 tahun 2012 sebagai mata kuliah wajib, yaitu Agama, Pancasila, Kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia. Dalam rangka menyempurnakan capaian pembelajaran, maka MKDU ditambah dengan bahasa Inggris, Kewirausahaan, dan mata kuliah yang mendorong pada pengembangan karakter lainnya, baik yang terintegrasi maupun individu.

Mata kuliah manajemen kewirausahaan, merupakan perwujudan dari pendidikan yang berwawasan kewirausahaan, adalah pendidikan yang menerapkan prinsip-prinsip dan metodologi

kearah pembentukan kecakapan hidup (*life skill*) pada peserta didiknya melalui kurikulum yang terintegrasi yang dikembangkan di perguruan tinggi. Dalam pendidikan kewirausahaan, peserta didik dituntut tidak hanya mampu menerapkan ilmu yang diperoleh di bangku kuliah, tetapi juga mampu memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu sikap wirausaha yang dikembangkan melalui pendidikan adalah kecakapan hidup (*life skill*).

Pengembangan program *life skills* pada umumnya bersumber pada kajian bidang dunia kerja (*the world of work*), keterampilan hidup praktis (*practical living skills*), pengelolaan dan pertumbuhan SDM (*personal growth and management*), dan keterampilan sosial (*social skills*). Pemahaman konsep *life skills* di atas, pada akhirnya akan memotivasi peserta didik untuk mengembangkan potensinya secara mandiri (wirausaha).

Pembelajaran Manajemen kewirausahaan di Perguruan Tinggi dan sebenarnya memiliki potensi yang cukup besar untuk melahirkan wirausahawan baru terdidik. dari bidang kajian dan disiplin ilmu yang dipelajari oleh mahasiswa terkait dengan kebutuhan dasar manusia (penyediaan sandang, pangan, papan dan kebutuhan dasar lainnya) memungkinkan mahasiswa mampu menciptakan ide-ide produk/bisnis yang lebih inovatif dan kreatif dengan memanfaatkan keunggulan komparatif yang masih didominasi oleh sektor pertanian sebagai basis ekonomi pada hampir seluruh daerah di Indonesia. Pengelolaan usaha di bidang pertanian oleh tenaga-tenaga terdidik lebih memungkinkan terwujudnya pemanfaatan sumberdaya alam yang tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. Dengan demikian, munculnya wirausaha-wirausaha baru di bidang teknologi yang merupakan lulusan perguruan tinggi tidak hanya dapat mengurangi tingkat pengangguran, namun juga dapat memberikan nilai tambah terhadap produk-produk primer sehingga dapat berdampak pada pengentasan kemiskinan terutama di perdesaan, pencapaian ketahanan pangan dan pelestarian lingkungan yang pada akhirnya akan berdampak pada tercapainya stabilitas ekonomi secara keseluruhan.

#### **4. Peta Konsep Penyiaian Mata Kuliah Kewirausahaan**

Dalam upaya memudahkan pelajar/mahasiswa, buku ini dibagi menjadi 14 kegiatan belajar, yang meliputi:

<b>KEWIRAUSAHAAN</b>	→ 1.	Pendahuluan
	→ 2.	Konsep Dasar Kewirausahaan
	→ 3.	Mengalisis Potensi Diri
	→ 4.	Motivasi dalam Kewirausahaan
	→ 5.	Komunikasi Organisasi Kewirausahaan
	→ 6.	Mengembangkan Kreatif Inovatif
	→ 7.	Profil Wirausahawan
	→ 8.	Perencanaan Organisasi Kewirausahaan
	→ 9.	Studi Kelayakan Usaha
	→ 10.	Rancangan Usaha Baru
	→ 11.	Pengorganisasian Usaha
	→ 12.	Pengawasan Usaha
	→ 13.	Dinamika Usaha
	→ 14.	Penaggulangnya

## **PENUTUP**

Uraian di atas, mengantarkan pada pentingnya mata kuliah Manajemen kewirausahaan sebagai refleksi pengembangan jiwa wirausaha di Perguruan tinggi, dikarenakan PT sebagai *agent of change* dalam upaya meningkatkan harkat kemanusiaannya dalam mengembangkan jiwa dan potensi bagi para mahasiswa. Dengan demikian, substansi materi manajemen kewirausahaan diarahkan pada pengkajian "Teori, praktek dan implementasi membangkitkan motivasi, untuk kreatif dan inovatif guna mencapai tujuan"

## **RANGKUMAN**

1. Perguruan Tinggi (PT) memiliki kedudukan strategis, prestisius, dan prospektif dalam menghasilkan sumber daya manusia unggul yang memiliki jiwa wirausaha. Tantangan yang dihadapi oleh PT antara lain bahwa menjadi wirausahawan kurang menarik bagi mayoritas lulusan PT karena orang Indonesia pada umumnya belum mengakuinya sebagai "pekerjaan" yang prestisius, bukan "priyayi".
2. Tuntutan kualitas PT tidak hanya selalu dihubungkan dengan tuntutan pasaran kerja sehingga PT dikuasai oleh *mainstream* ekonomi untuk berperan sebagai "pabrik tenaga kerja". PT sebagai *agent of change* dalam upaya meningkatkan harkat kemanusiaannya dapat berperan secara lebih aktif dalam mengembangkan jiwa dan potensi kewirausahaan bagi para mahasiswa. Eksistensi PT dalam pemberdayaan

ekonomi masyarakat dan pengembangan jiwa kewirausahaan mahasiswa dapat terjadi jika PT memiliki komitmen dan berpartisipasi dalam kegiatan perekonomian.

3. Untuk mengantisipasi dinamika global yang kompetitif dan perubahan sosial ekonomi, PT perlu menggalakkan kegiatan-kegiatan yang berdimensi kewirausahaan. Beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh PT bersama pemerintah yakni: (1) PT melalui kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler; (2) kebijakan pemerintah melalui Program Pengembangan Jiwa Kewirausahaan; (3) program-program Kewirausahaan melalui Kuliah Kerja Usaha (KKU) dan Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) bidang Kewirausahaan dengan pemberian subsidi dana sebagai modal kerja; (4) menciptakan jaringan secara sinergis dengan departemen/ instansi lain dan dunia usaha.
4. Dengan penerapan mata kuliah manajemen kewirausahaan, diharapkan PT dapat mendukung pembangunan manusia Indonesia secara komprehensif. Pembangunan manusia secara komprehensif, sebagaimana tersirat dalam UU Sisdiknas No. 20 tahun 2003 bahwa “Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara”.
5. Mata kuliah manajemen kewirausahaan, merupakan perwujudan dari pendidikan yang berwawasan kewirausahaan, adalah pendidikan yang menerapkan prinsip-prinsip dan metodologi kearah pembentukan kecakapan hidup (*life skill*) pada peserta didiknya melalui kurikulum yang terintegrasi yang dikembangkan di sekolah/ perguruan tinggi. Dalam pendidikan kewirausahaan, peserta didik dituntut tidak hanya mampu menerapkan ilmu yang diperoleh di bangku sekolah/ kuliah, tetapi juga mampu memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu sikap wirausaha yang dikembangkan melalui pendidikan adalah kecakapan hidup (*life skill*).
6. Substansi materi manajemen kewirausahaan diarahkan pada pengkajian ”Teori, praktek dan implementasi membangkitkan motivasi, untuk kreatif dan inovatif guna mencapai tujuan”

7. Munculnya wirausaha-wirausaha baru di bidang teknologi yang merupakan lulusan perguruan tinggi tidak hanya dapat mengurangi tingkat pengangguran, namun juga dapat memberikan nilai tambah terhadap produk-produk primer sehingga dapat berdampak pada pengentasan kemiskinan terutama di perdesaan, pencapaian ketahanan pangan dan pelestarian lingkungan yang pada akhirnya akan berdampak pada tercapainya stabilitas ekonomi secara keseluruhan.

## **LATIHAN**

1. Bagaimana kontribusi PT dalam membuka peluang kerja?
2. Jelaskan tentang akar historis PT dan dunia industri?
3. Bagaimana eksistensi PT dalam menumbuhkembangkan dunia wirausaha?
4. Polarisasi Perguruan Tinggi di Indonesia saat ini?
5. Bagaimana upaya meretas jiwa wirausaha yang dilakukan pemerintah?
6. Jelaskan refleksi pengembangan manajemen kewirausahaan?

## **PUSTAKA**

- Freire, Paulo. 1987. *Pendidikan yang Membebaskan* (Terj. Alois A. Nugroho). Jakarta: Gramedia.
- Kayam, Umar. 1989. "Kebudayaan Asing dan Pengembangan Kebudayaan". Makalah Seminar bertema "Sastra dan Pengembangan Nasional", Senat Mahasiswa FKSS IKIP Yogyakarta (UNY), 14 Oktober 1989.
- Sumianto, Agus dkk. 1989. "PT dan Kesempatan Kerja: Tinjauan Sosial, Budaya, dan Ketahanan Nasional". Makalah Seminar Nasional bertema "Tamatan PT, Kesempatan Kerja dan Pendayagunaan Pembangunan", 24-25 Januari 1989 di PT Muhammadiyah Surakarta.
- Todaro. 1987. *Ekonomi Pembangunan untuk Negara-negara sedang Berkembang* (Terjemahan). Jakarta: Erlangga.
- Vaizey, John. 1977. *Pendidikan di Dunia Modern* (Terjemahan). Jakarta: Gunung Agung.